

JUDUL: PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG MEMUAT KETENTUAN YANG TELAH DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Nama : Hudson Charitos

Jurusan/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S. H., M. Hum. ; H. Heru Susanto S.H., M.Hum.

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan mekanisme yang dihadirkan oleh *Founding Fathers* sebagai solusi bilamana ada suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun, fakta menunjukkan bahwa seringkali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimuat kembali dalam Undang-Undang yang baru, seperti pemuatan kembali ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagai dalil dikemukakan di kalangan para ahli baik dari sisi yang mendukung maupun tidak mendukung pemuatan kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga timbul permasalahan yakni apakah Pemuatan kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dan bila tidak, apakah larangan pemuatan kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan serta apakah konsekuensinya? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuatan kembali ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal yang tidak boleh untuk dilakukan karena hal tersebut telah melanggar kesepakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai solusi tentunya pelarangan menjadi sebuah terobosan hukum demi efektifitas dan efisiensi dalam menangani permasalahan tersebut. Pelarangan juga dilengkapi dengan mekanisme preventif yakni pembentukan lembaga yang dapat memberikan rekomendasi kepada pembentuk Undang-Undang serta mekanisme *Constitutional Preview* juga dapat diberlakukan.

Kata Kunci : Pembentukan Undang-Undang, Pemuatan Kembali, Mahkamah Konstitusi.

TITLE: ESTABLISHMENT OF LAW CONTAINING PROVISION THAT HAD BEEN REVOKED BY THE CONSTITUTIONAL COURT

Name : Hudson Charitos

Dicipline/ Study Programme : Law / Legal Studies

Contributor : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S. H., M. Hum. ; H. Heru Susanto S.H.,
M.Hum.

Abstract

The Authority of the Constitutional Court to examine the law against the Constitution is a mechanism presented by the Founding Fathers as a solution if there is a law that contrary against the Constitution. However, the facts show that often provisions that have been revoked by the Constitutional Court are re-published in new laws, such as the provisions of Article 159 paragraph (1) of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President which has been canceled by The Constitutional Court through the Decision of the Constitutional Court Number 50 / PUU-XII / 2014 in Article 416 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. Various arguments were forwarded among the experts, both from the side that supported or did not regarding the existence of the law that contain provision that had been revoked by the Constitutional Court. The problem is whether the republication of provision that had been revoked by the Constitutional Court could be done or not, and if not, whether the prohibition of republication of provision that had been revoked by the Constitutional Court can be enforced and what are the consequences? In accordance with the problem, this study will use a juridical normative research method. This research shows that the republication of the provision that had been revoked by the Constitutional Court should not be done because it violate the agreement that stated on the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. As for the solution, prohibition becomes a legal breakthrough for the sake of effectiveness and efficiency in dealing with these problems. The Prohibition is also supported with a preventive mechanism, which is the establishment of an institution that can provide recommendation to legislators, furthermore Constitutional Preview mechanism can also be enforced.

Keywords : establishment of law, revitalization, Constitutional Court.